

# Pendidikan Politik Bagi Perempuan Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Politik

Fitra Hadi Khaz<sup>1</sup>, Refdi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning Dumai

E-mail: 1fitrahadikhaz@gmail.com

## *Abstract*

*Pendidikan politik merupakan agenda yang sangat penting, karena dalam melangsungkan pembangunan sebuah bangsa memerlukan syarat untuk keterdidikan rakyat secara politik. Rakyat yang terdidik secara politik adalah warga negara, sehingga ia bisa secara sadar mandiri ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan. Dengan pendidikan politik masyarakat dimungkinkan untuk memiliki kebudayaan politik yang ideal, yakni kesadaran untuk mendukung sistem politik dan sekaligus mampu memberikan kritik dan koreksi.*

**Keywords:** (Pendidikan, Politik, Perempuan)

## **Abstrak**

The Political education is a very important agenda, because carrying out the development of a nation requires conditions for the political education of the people. People who are politically educated are citizens, so that they can consciously and independently participate both directly and indirectly in the development process. With political education, it is possible for society to have an ideal political culture, namely awareness to support the political system and at the same time being able to provide criticism and correction.

**Keywords:** (Education, Politic, Woman)

## **Pendahuluan**

Menurut Gabriel Almond (1986), pendidikan politik adalah bagian dari sosialisasi politik yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Mohammad Nuh sebagaimana dikutip oleh Wayan Sohib (2009) mengatakan, pendidikan politik tidak terbatas pada pengenalan seseorang terhadap peran individu dalam partisipasinya dalam pemerintahan, partai politik dan birokrasi. Tetapi pada hakikatnya adalah terbangunnya proses pendewasaan dan pencerdasan seseorang akan tanggung jawab individu dan kolektif untuk menyelesaikan permasalahan bangsa sesuai otoritasnya yang mengandung makna mentalitas dan etika dalam berpolitik (Rahman, 2018: 47)

Salah satu pendukung demokrasi yang sangat potensial adalah keterlibatan kaum perempuan dalam kancah politik. Sudah saatnya penguatan hak politik dan pendidikan politik bagi perempuan diutamakan. Pendidikan politik bagi perempuan harus mempunyai arah yang jelas menuju pada kemampuan kaum perempuan yang memiliki kekuatan penyadaran akan pentingnya pembebasan kaum perempuan terhadap

marginalisasi politik terhadap kaumnya, sehingga kaum perempuan memiliki jati diri yang kuat dalam kiprah politiknya. Pendidikan politik perempuan bertujuan untuk membebaskan perempuan dari ketidaksetaraan perlakuan dan bukan bertujuan pada kekuasaan atau penguasaan (dominasi), sebagaimana yang selama ini dilakukan.

Meskipun saat ini politisi perempuan sudah mulai bermunculan, namun dalam kenyataan belum begitu besar pengaruhnya dalam memperjuangkan aspirasinya. Politisi perempuan sangat diharapkan bisa memberikan warna dan penyeimbang dalam kiprahnya di dunia politik. Tetapi karena masih kurangnya pengalaman, pendidikan politik, faktor sosial dan budaya, mengakibatkan jumlah perempuan masih sangat minim dalam kancah politik di Indonesia. Oleh karena itu, jalan yang harus ditempuh adalah menciptakan kesadaran politik perempuan dalam meningkatkan peran politiknya adalah dengan memberikan pendidikan politik sesuai dengan makna yang sebenarnya, sehingga dalam kancah politik, perempuan mempunyai peran dalam mengembangkan demokrasi dan cerdas dalam menentukan sikap politiknya.

Pendidikan politik diharapkan dapat menjadi sarana bagi terwujudnya masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai persoalan politik serta memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pendidikan politik diperlukan bukan saja bagi para pemilih yang kurang atau belum memiliki pemahaman tentang persoalan politik tetapi juga bagi para pemilih yang sudah memiliki pengetahuan tentang persoalan politik.

Hal ini menjadikan pentingnya pendidikan politik (political education) bagi rakyat. Dengan kata lain, pendidikan politik memiliki makna yang penting dan strategis dalam rangka mendorong warga negara (pemilih) untuk memiliki pengetahuan politik yang memadai.

Pendidikan politik merupakan agenda yang sangat penting, karena dalam melangsungkan pembangunan sebuah bangsa memerlukan syarat untuk keterdidikan rakyat secara politik. Rakyat yang terdidik secara politik adalah warga negara, sehingga ia bisa secara sadar mandiri ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan. Dengan pendidikan politik masyarakat dimungkinkan untuk memiliki kebudayaan politik yang ideal, yakni kesadaran untuk mendukung sistem politik dan sekaligus mampu memberikan kritik dan koreksi.

Pentingnya pemberdayaan masyarakat juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam undang-undang ini, pemerintah menetapkan bahwa tujuan pembangunan nasional mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang dapat dicapai melalui pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat. Melalui kerangka hukum tersebut, pemberdayaan masyarakat bukan hanya menjadi agenda pembangunan lokal, melainkan diangkat sebagai prioritas nasional. Hal ini mencerminkan kesadaran bahwa tanpa partisipasi dan kontribusi aktif masyarakat, pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif sulit dicapai. Oleh karena itu, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat sebagai landasan pembangunan nasional dapat menciptakan dasar yang kuat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan menyeluruh.

Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas nasional dalam pembangunan bukan hanya merupakan sebuah konsep idealis, tetapi juga sebuah keharusan strategis dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Pemberdayaan masyarakat bukan sekadar agenda tambahan, melainkan suatu prinsip yang mendasari visi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan adil.

Pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Pendidikan Politik Bagi Perempuan

Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Politik" merupakan langkah konkrit untuk mendukung agenda pembangunan nasional. Melalui penelitian dan intervensi langsung di lapangan, kita dapat memahami lebih dalam tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mengimplementasikan pemberdayaan, dan sekaligus merancang solusi yang efektif. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, pengabdian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat, pengembangan keterampilan, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya kerja sama aktif antara peneliti, praktisi, dan masyarakat dalam mewujudkan pemberdayaan sebagai pijakan utama dalam proses pembangunan

### **Pedekatan Pelaksanaan Program**

Kegiatan PKM ini dilaksanakan di kantor PKK Kelurahan Rimba Sekampung pada hari Kamis, 18 Januari 2024 pukul 14.00 WIB di Jalan Belimbing Kota Dumai.

Metode yang diterapkan dalam kegiatan PKM ini adalah Penyuluhan/Pelatihan dan Simulasi (education approach). Menurut Samsudin (1987), penyuluhan adalah sistem pendidikan non formal tanpa paksaan menjadikan seseorang sadar dan yakin bahwa sesuatu yang diajarkan itu akan membawa ke arah perbaikan dari hal-hal yang dikerjakan atau dilaksanakan sebelumnya.

Teknik penyuluhan yang digunakan adalah teknik komunikasi informatif dan persuasif. Teknik komunikasi informatif adalah proses penyampaian pesan yang sifatnya "memberi tahu" atau memberikan penjelasan kepada orang lain. Teknik komunikasi persuasif merupakan suatu teknik komunikasi yang dilakukan agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan, melakukan suatu perbuatan atau kegiatan dan lain sebagainya sesuai dengan yang diharapkan. Melalui pendekatan komunikatif diharapkan terjalin interaksi sosial yang interaktif antara Tim PKM dan peserta yang konstruktif, kondusif, dan dinamis selama kegiatan PKM.

Adapun tahapan kegiatan yang dilaksanakan, meliputi: a) perkenalan; b) penyajian materi oleh narasumber; c) penyampaian informasi terkini tentang pencegahan stunting; d) interaktif tanya jawab; dan e) foto bersama dan ramah tamah

### **Pelaksanaan Program**

Pemberdayaan masyarakat merupakan landasan penting dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam konteks ini, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan judul "Pendidikan Politik Bagi Perempuan Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Politik" menjadi wahana untuk mendiskusikan dan mendorong peran aktif masyarakat, khususnya Ibu-Ibu PKK Kelurahan Rimba Sekampung, dalam pembangunan yang berkelanjutan. Pertama-tama, pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas nasional perlu dipahami sebagai langkah strategis dalam membangun fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Masyarakat yang memiliki peran aktif dalam proses pembangunan akan menjadi agen perubahan yang mampu mengatasi tantangan lokal dengan solusi yang berbasis pada kearifan lokal.

Dalam konteks kegiatan PKM ini, pemberdayaan perempuan melalui PKK menjadi titik fokus. Peran Ibu-Ibu PKK sebagai tulang punggung keluarga dan agen perubahan di masyarakat memegang peranan krusial dalam menggerakkan roda pembangunan. Peningkatan kapasitas perempuan dalam berbagai aspek, seperti

ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, dapat menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Pelatihan keterampilan wirausaha menjadi bagian integral dari kegiatan ini, mengingat peran ekonomi dalam menopang stabilitas keluarga. Ibu-Ibu PKK diajak untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka melalui usaha mikro dan kecil, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif pada perekonomian lokal.

Selain itu, penekanan pada aspek kesehatan masyarakat memberikan gambaran holistik tentang pentingnya kesehatan sebagai modal utama dalam upaya pemberdayaan. Informasi tentang pola hidup sehat, pencegahan penyakit, dan akses layanan kesehatan menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Pendidikan, sebagai pilar pembangunan manusia, turut menjadi fokus pembahasan. Melalui peningkatan kapasitas pendidikan, baik bagi anak-anak maupun bagi Ibu-Ibu PKK, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal anak-anak dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Dengan demikian, kegiatan PKM ini bukan hanya sebagai forum informasi, tetapi juga sebagai katalisator perubahan positif yang berkelanjutan dalam masyarakat lokal. Melalui pemberdayaan masyarakat, harapannya adalah munculnya kemandirian dan partisipasi yang tinggi, sejalan dengan visi pembangunan nasional yang inklusif dan berkesinambungan.

### **Refleksi Capaian Program**

Pemberdayaan Masyarakat sebagai Prioritas Nasional dalam Pembangunan adalah bahwa pemberdayaan masyarakat, terutama melalui peran kunci Ibu-Ibu PKK Kelurahan Rimba Sekampung, memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Melalui serangkaian kegiatan berbasis partisipatif, seperti pelatihan keterampilan wirausaha, peningkatan kesehatan, dan pengembangan kapasitas pendidikan, diharapkan masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang aktif dan berdaya. Pentingnya pemberdayaan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Perempuan, sebagai elemen kunci dalam struktur sosial, dapat memberikan kontribusi signifikan melalui peran mereka dalam PKK. Pemberdayaan perempuan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan keluarga tetapi juga memperkuat pondasi pembangunan nasional.

Kegiatan PKM ini bukan hanya memberikan informasi, tetapi juga menciptakan momentum untuk perubahan sosial yang positif. Dengan memotivasi dan memberdayakan Ibu-Ibu PKK, diharapkan mereka dapat menjadi agen perubahan di lingkungan mereka masing-masing. Kesadaran akan peran dan tanggung jawab dalam pembangunan nasional juga menjadi inti dari kegiatan ini, mengajak masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

### **Penutup**

Dengan demikian, kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa pemberdayaan masyarakat bukan hanya menjadi prioritas nasional, tetapi juga merupakan langkah kunci menuju masyarakat yang lebih mandiri, sehat, dan terlibat aktif dalam proses pembangunan. Melalui kolaborasi yang erat antara pemateri, peserta, dan elemen-elemen masyarakat setempat, diharapkan dampak positif kegiatan ini dapat terus dirasakan dan berkembang dalam jangka panjang.

**Daftar Pustaka**

- Alsop, R., & Heinsohn, N. (2005). *Measuring Empowerment in Practice: Structuring Analysis and Framing Indicators*. World Bank Publications.
- Chambers, R. (1994). Participatory Rural Appraisal (PRA): Challenges, Potentials and Paradigm. *World Development*, 22(10), 1437–1454.
- Narayan, D. (2002). *Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook*. World Bank Publications.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Sen, A. (2001). The Discipline of Development. *Journal of Economic Perspectives*, 15(3), 89– 102.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44610/uu-no-6-tahun-2014>
- World Bank. (2017). *Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook*. Retrieved from <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26447/9781464810477.pdf>